

Simbolisme dalam Praktik Pengelolaan dan Komunikasi Keuangan di Kabupaten Luwu

Eva Astria¹, Antong², Halim Usman³

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City Sulawesi Selatan

²Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City Sulawesi Selatan

³Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City Sulawesi Selatan

evaastria0909@icloud.com, antong@umpalopo.ac.id, halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb 25, 2026

Accepted Apr 23, 2026

Keywords:

village accounting, symbolism, accountability, transparency

ABSTRACT

This study examines symbolism in the practice of village financial management and communication, as well as how these symbols are interpreted by village officials and the community in shaping transparency, accountability, and the legitimacy of village government. The study uses a qualitative approach with an interpretive paradigm based on symbolic interactionism theory. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of financial management in three villages in Luwu Regency and then analyzed interpretatively. The results show that accounting practices are interpreted in various ways, ranging from symbols of administrative order through reports and information boards, symbols of participation through deliberations, to symbols of morality and social trust through direct interaction between officials and villagers. Transparency in villages needs to consider the symbolic dimension and social communication in village accounting practices.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Eva Astria

Department of Accounting

Faculty of Economy & Business

University, Muhammadiyah Palopo

Email: evaastria0909@icloud.com

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini ditempatkan dalam kajian akuntansi sektor publik, khususnya pada konteks pemerintahan desa, dengan memandang akuntansi tidak dipahami hanya sebagai teknik pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi sebagai praktik sosial yang berfungsi membentuk pemahaman akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi publik. Dalam konteks desa, laporan keuangan, papan informasi anggaran, dan forum pertanggungjawaban dipahami sebagai bagian dari praktik akuntansi yang memiliki makna sosial dan simbolik bagi aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian,

penelitian ini berkontribusi pada kajian akuntansi dengan mengkaji bagaimana praktik akuntansi desa dimaknai dan dijalankan dalam konteks sosial lokal.

Akuntansi desa merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Praktik akuntansi desa mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa dan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi keuangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariani *et al.*, 2025) dan (Dewi *et al.*, 2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik di desa berperan dalam membangun keterbukaan informasi dan memperkuat pertanggungjawaban publik.

Perspektif tersebut memperoleh relevansi mengingat pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan modern, transparansi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran publik (Tobler, 2015). Akuntabilitas pemerintah desa juga semakin menjadi sorotan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap praktik pengelolaan keuangan yang baik (Rahayu, 2019). Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi belum merata di berbagai daerah (Kafrini *et al.*, 2022), sehingga tata kelola keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan tata kelola publik (Wangdi, 2023).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa kerap dipengaruhi oleh dinamika sosial di tingkat lokal (Betan & Nugroho, 2021). Aparatur desa tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan formal, tetapi juga memahami ekspektasi sosial masyarakat terhadap proses pertanggungjawaban anggaran (Isnaeni & Nugraeni, 2023). Perspektif interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Blumer (1969) menekankan bahwa tindakan, pesan, dan praktik komunikasi pemerintah desa merupakan bagian dari proses pemaknaan sosial yang muncul melalui interaksi sosial. Dalam kerangka tersebut, laporan keuangan, papan informasi, dan forum musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan yang membentuk persepsi publik (Attaqy & Khairudin, 2022).

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi terbukti memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan alokasi dana desa (Susanti *et al.*, 2023). Penelitian kualitatif menegaskan bahwa masyarakat menafsirkan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga cara aparat desa menyampaikan informasi dan merespons kebutuhan warga (Setyawati, 2020). Tingkat akuntabilitas dan transparansi berkorelasi langsung dengan kualitas laporan keuangan desa (Armaida & Siregar, 2024). Sistem informasi seperti SISKEUDES turut memperluas akses masyarakat terhadap informasi anggaran dan memperkuat fungsi kontrol sosial (Harahap, 2023).

Selain praktik administratif, penerapan prinsip good governance juga berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di desa (Suciana, 2025). Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan semata-mata aktivitas teknis, tetapi juga praktik sosial yang mengandung simbol, nilai, dan makna. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menyingkap dimensi simbolik yang terkandung dalam komunikasi dan pengelolaan keuangan desa, menentang anggapan bahwa praktik akuntansi bersifat bebas nilai, karena budaya dan konteks lokal turut membentuk cara laporan keuangan disusun dan dipahami. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan akuntansi desa sebagai praktik simbolik dalam komunikasi dan interaksi sosial masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana simbolisme dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa terbentuk dan memengaruhi

persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi aparat desa. Pertanyaan penelitian diarahkan untuk menelusuri bagaimana simbol-simbol keuangan desa diwujudkan dalam praktik sehari-hari, bagaimana aparat desa dan masyarakat memaknai simbol tersebut melalui interaksi sosial, serta bagaimana simbolisme tersebut mencerminkan hubungan kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi di tingkat desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi simbol transparansi dan akuntabilitas yang muncul dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa, memahami makna yang diberikan oleh aparat dan masyarakat terhadap simbol-simbol tersebut, serta menjelaskan bagaimana simbolisme berperan dalam membentuk relasi sosial, kepercayaan, dan legitimasi di desa. Dengan pendekatan interpretatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna sosial yang terkandung di balik praktik administratif, serta menegaskan bahwa akuntansi publik tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan simbolik. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menilai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif, melainkan memahami bagaimana praktik dan komunikasi keuangan desa dimaknai secara simbolik oleh aparat dan masyarakat dalam membentuk akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi di tingkat lokal.

Kajian Literatur

Pendekatan Simbolik-Interpretatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dengan landasan interaksionisme simbolik Blumer (1969) untuk menganalisis praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa. Perspektif ini menekankan bahwa makna tidak melekat secara otomatis pada objek atau tindakan, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan dapat berubah sesuai interpretasi para aktor yang terlibat. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan, papan informasi, forum musyawarah, dan istilah teknis berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai simbol yang membentuk persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi aparat desa (Attaqy & Khairudin, 2022).

Beberapa penelitian relevan mendukung pentingnya simbolisme dalam praktik akuntansi publik. Tobler (2015) menekankan bahwa transparansi menjadi instrumen global untuk mengawasi penggunaan anggaran publik. Rahayu (2019) menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Kafrini *et al.*, (2022) menemukan bahwa keterbatasan literasi keuangan aparat desa memengaruhi penyusunan laporan keuangan. Wangdi (2023) mengungkap bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan belum optimal akibat kapasitas SDM yang terbatas. Betan & Nugroho (2021) menegaskan bahwa mekanisme komunikasi publik formal tidak selalu mendorong partisipasi masyarakat. Sebaliknya, Isnaeni & Nugraeni (2023) menemukan bahwa sistem akuntansi berbasis teknologi yang dipadukan dengan keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi tidak hanya oleh regulasi formal, tetapi juga oleh interaksi sosial, kapasitas aparat, dan komunikasi keuangan yang mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan interpretatif memungkinkan penelitian ini mengungkap makna simbolik di balik praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa, yang tidak dapat ditangkap melalui analisis kuantitatif semata. Oleh karena itu, teori interaksionisme simbolik digunakan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan data empiris dan mengidentifikasi makna simbolik dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan di Organisasi Pemerintah Desa

Pengelolaan keuangan publik menjadi isu strategis karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Praktik pengelolaan yang mapan dicirikan oleh prosedur pelaporan yang jelas, keterlibatan masyarakat, penerapan prinsip good governance, dan digitalisasi

laporan keuangan. Sulistyowati & Nataliawati (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam pengelolaan dana desa. Fadhilla *et al.* (2024) menegaskan bahwa transparansi dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berfungsi sebagai indikator legitimasi pemerintah desa, terutama karena proses penyaluran bantuan melibatkan komunikasi langsung antara aparat desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan publik.

Selanjutnya, Suliyatini *et al.*, (2025), menemukan bahwa konsistensi praktik pelaporan, kejelasan struktur akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran (Harahap, 2023). Ahmad (2025) menegaskan bahwa kejelasan dan keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama efektivitas pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, beberapa studi menekankan peran komunikasi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap transparansi. Brenda Ratnasar (2015) menunjukkan bahwa musyawarah, sosialisasi, dan publikasi informasi keuangan memperkuat persepsi keterbukaan masyarakat. Jannah & Satria (2022) memandang pelaporan langsung kepada warga sebagai simbol kejujuran dan transparansi aparat desa, sementara Susanti *et al.*, (2023) menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan pertanggungjawaban aparat.

Lebih lanjut, Setyawati (2020) menunjukkan bahwa masyarakat menilai transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dari dokumen formal, tetapi juga dari cara aparat desa menyampaikan informasi dan merespons kebutuhan warga. Penerapan prinsip good governance terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat (Suciana, 2025).

Literasi Pengelolaan Keuangan Desa

Literasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan, tetapi juga mencerminkan proses pemaknaan sosial yang berlangsung dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, praktik tersebut dipahami sebagai tindakan bermakna yang dibentuk melalui interaksi sosial antar aktor desa (Blumer, 1969). Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan tidak hanya melalui dokumen formal, tetapi juga melalui simbol, bahasa, dan cara penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat, sehingga akuntansi desa berfungsi sebagai media komunikasi sosial (Rahayu, 2019).

Pendekatan interpretatif memandang praktik pengelolaan keuangan desa sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, meskipun regulasi formal diterapkan secara seragam. Praktik akuntansi desa tidak bersifat netral, melainkan mengandung makna simbolik yang berkaitan dengan relasi sosial dan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Oleh karena itu, literasi pengelolaan keuangan desa mencakup pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya lokal agar praktik keuangan desa tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pembentukan kepercayaan masyarakat (Brenda Ratnasari, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Paradigma, Situs, dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna melalui interaksi, pengalaman, dan konteks budaya masyarakat. Paradigma ini

memungkinkan peneliti memahami praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa berdasarkan makna yang diberikan oleh para pelaku, bukan sekadar sebagai data teknis atau administratif (Shonhadji, 2021). Landasan teoritis penelitian ini adalah teori interaksi simbolik Blumer (1969), yang menekankan bahwa tindakan sosial ditentukan oleh makna yang terbentuk dan berkembang melalui proses interaksi. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menafsirkan bagaimana aparat desa dan masyarakat memaknai simbol-simbol keuangan desa, seperti laporan keuangan, papan informasi publik, dan forum musyawarah, serta bagaimana makna tersebut memengaruhi persepsi transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi.

Secara empiris, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi celah kajian yang selama ini cenderung memandang akuntansi desa sebagai sistem teknis, dengan menawarkan perspektif simbolik-interpretatif yang menempatkan pengelolaan dan komunikasi keuangan desa sebagai praktik sosial yang sarat makna.

Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Luwu, yaitu Desa Lare-Lare, Desa Posi, dan Desa Barowa. Ketiga desa dipilih karena menunjukkan perbedaan dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa, terutama dalam pelaksanaan musyawarah, penyampaian informasi anggaran, dan penggunaan sistem akuntansi desa. Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatannya, meliputi kepala desa dan bendahara desa sebagai pengelola keuangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas, serta tokoh masyarakat sebagai representasi warga.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Desa	Justifikasi Teoritis
Harnisa	Bendahara Desa	Lare-Lare	Memiliki peran langsung dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa
Milda	Anggota BPD	Lare-Lare	Mewakili masyarakat dalam pengawasan keuangan desa
Kamal	Tokoh Masyarakat	Lare-Lare	Mewakili warga yang merasakan praktik komunikasi keuangan
Dewi	Bendahara Desa	Posi	Memiliki peran langsung dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa
Arham	Anggota BPD	Posi	Mewakili masyarakat dalam pengawasan keuangan desa
Andi Aura	Tokoh Masyarakat	Posi	Mewakili warga yang merasakan praktik komunikasi keuangan
Marsus	Kepala Desa	Barowa	Memiliki peran langsung dalam penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa
Ahmad	Anggota BPD	Barowa	Mewakili masyarakat dalam pengawasan keuangan desa
Aisyah	Tokoh Masyarakat	Barowa	Mewakili warga yang merasakan praktik komunikasi keuangan

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, observasi kegiatan pengelolaan keuangan dan musyawarah desa, serta dokumentasi berupa laporan keuangan, papan informasi anggaran, dan notulen musyawarah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif dengan mengidentifikasi tema utama seperti transparansi, akuntabilitas, legitimasi, dan kepercayaan sosial. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, konfirmasi kepada informan (member check), audit trail, serta diskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk meminimalkan

bias penafsiran. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tema-tema interpretatif yang dibahas pada Bab Hasil dan Pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Temuan

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, observasi partisipatif, serta telaah dokumen pengelolaan keuangan pada tiga desa di Kabupaten Luwu. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan mengikuti prinsip paradigma interpretatif. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi dan dibaca secara berulang untuk memahami konteks serta makna yang terkandung dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa.

Proses analisis dilakukan melalui tahap pengkodean secara bertahap. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data yang mengandung makna tertentu dan memberi tanda atau kode sesuai dengan isi pernyataan informan. Selanjutnya, kode-kode yang memiliki keterkaitan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Dari pengelompokan tersebut kemudian ditetapkan tema-tema utama penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas, legitimasi, dan kepercayaan sosial. Tema-tema tersebut ditafsirkan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik untuk memahami bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial antar aktor di tingkat desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa dimaknai secara berbeda oleh aparat desa, BPD, dan masyarakat sesuai dengan konteks sosial masing-masing desa. Bagi aparat desa, praktik akuntansi lebih dipahami sebagai bentuk kepatuhan administratif terhadap peraturan. Sebaliknya, bagi masyarakat dan BPD, praktik tersebut dimaknai sebagai indikator keterbukaan dan tanggung jawab moral pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa.

Pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemasangan papan informasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi simbol formal transparansi dan akuntabilitas. Makna simbolik tersebut semakin kuat ketika disertai interaksi langsung melalui forum musyawarah dan komunikasi terbuka antara aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi tidak hanya dibangun melalui dokumen tertulis, tetapi melalui proses interaksi sosial yang membentuk legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa praktik akuntansi desa merupakan praktik sosial yang sarat makna simbolik, di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, partisipasi, dan konteks lokal masing-masing desa.

Tabel 4.2 Temuan Tema Penelitian

Nama Informan	Elaborasi Wawancara (Kutipan)	Relevansi dengan Akuntabilitas dan Komunikasi Keuangan Desa	Analisis Tema	Temuan Tema
Harnisa	“Pertama-tama kami selalu mencatat setiap transaksi dan melaporkan melalui musyawarah, serta mencatat di papan supaya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.”	Menunjukkan akuntabilitas melalui pencatatan, pelaporan, dan papan informasi sebagai bentuk keterbukaan formal kepada masyarakat.	Akuntabilitas berbasis prosedur formal	Akuntabilitas sebagai Simbol Keteraturan Administratif

Dewi	“Papan dan laporan itu tanda keterbukaan. Setiap pencairan dana kami buat infografis realisasi dan dipasang di balai desa, sekaligus forum musyawarah untuk menjelaskan penggunaan dana dan menerima masukan warga.”			
Milda	“Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, kalau ada warga bertanya atau ada keluhan akan kami sampaikan ke pemerintah desa dan dibahas bersama dalam musyawarah. Itu yang membuat masyarakat tetap percaya kepada kami.”	Menunjukkan akuntabilitas dibangun melalui partisipasi warga dan komunikasi dua arah.	Akuntabilitas melalui partisipasi warga	Akuntabilitas sebagai Praktik Partisipatif
Arham	“Kalau masyarakat sampaikan pertanyaan atau keluhan, kami selaku BPD langsung menyampaikannya ke aparat desa agar dibahas di rapat. Cara ini membuat masyarakat merasa suaranya didengar dan mencegah konflik.”			
Andi Aura	“Musyawarah itu penting, supaya semua bisa bicara dan tidak curiga.”			
Kamal	“Sekarang aparat sering turun langsung ke dusun, jadi komunikasi lebih dekat, tidak kaku, makanya warga juga percaya.”	Menunjukkan akuntabilitas berbasis kepercayaan melalui komunikasi interpersonal dan interaksi sosial.	Akuntabilitas berbasis moral dan kepercayaan	Akuntabilitas sebagai Simbol Moralitas dan Kepercayaan Sosial
Aisyah	“Kami tetap partisipasi langsung, bisa kasih masukan kalau turun langsung ke kegiatan. Itu membuat masyarakat percaya karena terlibat bersama-sama.”			

Ahmad	“Kami ikut dalam pembahasan dan memeriksa laporan keuangan sebelum diumumkan ke masyarakat supaya dana digunakan sesuai keputusan musyawarah.”
-------	--

Temuan penelitian ini tetap berada dalam ranah akuntansi sektor publik karena yang dikaji adalah praktik akuntansi desa, khususnya pelaporan, pertanggungjawaban, dan komunikasi informasi keuangan kepada publik. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana praktik akuntansi dijalankan, dikomunikasikan, dan dimaknai oleh para aktor desa dalam konteks pemerintahan lokal. Dimensi sosial yang muncul merupakan bagian integral dari praktik akuntansi publik itu sendiri.

Akuntabilitas sebagai Simbol Keteraturan Administratif

Temuan pertama menunjukkan bahwa sebagian aktor desa memaknai akuntabilitas terutama sebagai keteraturan administratif, di mana laporan, papan informasi, dan dokumen pertanggungjawaban menjadi simbol utama transparansi. Praktik ini menekankan kepatuhan terhadap prosedur formal dan visibilitas penggunaan anggaran.

“Pertama-tama kami selalu mencatat setiap transaksi dan melaporkan melalui musyawarah, serta mencatat di papan supaya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.” (Harnisa)

“Papan dan laporan itu tanda keterbukaan. Setiap pencairan dana kami buat infografis realisasi dan dipasang di balai desa, sekaligus forum musyawarah untuk menjelaskan penggunaan dana dan menerima masukan warga.” (Dewi)

Akuntabilitas administratif berfungsi sebagai media komunikasi formal yang memperlihatkan penggunaan anggaran secara tertulis dan terstruktur. Papan informasi dan dokumen resmi menjadi artefak yang memungkinkan masyarakat menilai keteraturan pengelolaan keuangan desa. Simbol administratif ini membangun legitimasi formal pemerintah desa di mata masyarakat.

Akuntabilitas sebagai Praktik Partisipatif

Temuan kedua menyoroti akuntabilitas melalui partisipasi warga dan interaksi sosial. Forum musyawarah berfungsi sebagai ruang simbolik untuk menegosiasikan makna akuntabilitas secara kolektif.

“Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, kalau ada warga bertanya atau ada keluhan akan kami sampaikan ke pemerintah desa dan dibahas bersama dalam musyawarah. Itu yang membuat masyarakat tetap percaya kepada kami.” (Milda)

“Kalau masyarakat sampaikan pertanyaan atau keluhan, kami selaku BPD langsung menyampaikannya ke aparat desa agar dibahas di rapat. Cara ini membuat masyarakat merasa suaranya didengar dan mencegah konflik.” (Arham)

“Musyawarah itu penting, supaya semua bisa bicara dan tidak curiga.” (Andi Aura)

Partisipasi warga menjadi kontrol sosial sekaligus medium komunikasi dan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas partisipatif memungkinkan warga ikut menilai, memberikan masukan, dan membangun kepercayaan melalui interaksi langsung.

Akuntabilitas sebagai Simbol Moralitas dan Kepercayaan Sosial

Temuan ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih banyak dimaknai melalui nilai moral, kejujuran, dan relasi sosial antara aparat dan masyarakat. Transparansi tidak selalu diwujudkan melalui papan atau dokumen, tetapi melalui komunikasi interpersonal dan keterlibatan nyata.

“Sekarang aparat sering turun langsung ke dusun, jadi komunikasi lebih dekat, tidak kaku, makanya warga juga percaya.” (Kamal)

“Kami tetap partisipasi langsung, bisa kasih masukan kalau turun langsung ke kegiatan. Itu membuat masyarakat percaya karena terlibat bersama-sama.” (Aisyah)

“Kami ikut dalam pembahasan dan memeriksa laporan keuangan sebelum diumumkan ke masyarakat supaya dana digunakan sesuai keputusan musyawarah.” (Ahmad)

Kepercayaan masyarakat terbentuk dari konsistensi antara tindakan pengelolaan anggaran, laporan keuangan, dan komunikasi interpersonal. Integritas aparat menjadi simbol utama akuntabilitas berbasis moral.

Perbandingan Kontekstual Makna Akuntabilitas Antar Desa

Perbandingan antar desa menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kerangka regulasi pengelolaan keuangan desa yang sama, praktik akuntansi berkembang berbeda sesuai dinamika sosial dan budaya lokal. Desa Lare-Lare menekankan simbol keteraturan administratif, Desa Posi menekankan simbol partisipasi dan dialog warga, sedangkan Desa Barowa menekankan simbol moralitas dan kepercayaan sosial.

Perbedaan ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukan konsep universal yang berlaku seragam, melainkan konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi dan simbol-simbol komunikasi keuangan desa.

Implikasi Teoretis dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan (Blumer, 1969) bahwa makna tidak melekat pada objek atau prosedur secara inheren, tetapi dibangun melalui interaksi sosial. Laporan keuangan, papan informasi, musyawarah, dan kejujuran aparat desa berfungsi sebagai simbol yang ditafsirkan berbeda oleh aktor desa.

Dengan demikian, akuntansi desa tidak hanya merupakan sistem teknis terbatas pada pencatatan dan pelaporan, tetapi juga praktik sosial yang membentuk makna, kepercayaan, dan legitimasi publik. Simbol-simbol ini menjadi jembatan antara prosedur teknis dan konteks sosial, memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman yang dimiliki oleh pejabat desa dan komunitas terkait praktik pengelolaan serta komunikasi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap praktik akuntansi desa bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan cara interaksi yang terjadi. Walaupun akuntabilitas tidak menjadi tujuan utama pada awal studi, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab, baik melalui prosedur administrasi, partisipasi masyarakat, musyawarah desa, maupun berdasarkan nilai moral dan kepercayaan sosial. Hal ini mempertegas bahwa akuntansi desa tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga kaya akan dimensi sosial yang berperan dalam legitimasi dan kepercayaan publik.

Dalam aspek teoretis, penelitian ini menambah wawasan dalam literatur akuntansi sektor publik melalui sudut pandang interpretatif dengan mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah konstruksi sosial yang muncul dari interaksi antar individu dalam konteks lokal. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang akuntansi desa dengan menyoroti bahwa praktik ini bersifat sosial dan kontekstual, bukan hanya sebuah sistem teknis yang berlaku secara umum.

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa peningkatan akuntabilitas desa tidak bisa hanya bergantung pada perbaikan sistem dan prosedur pelaporan, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan komunikasi dua arah, serta penciptaan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan antara pemerintahan desa dan warga. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami dan memperbaiki praktik akuntansi serta akuntabilitas di level desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2025). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengelolaan dana desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Ariani, P. S., Luh, N., Erni, G., & Musmini, L. S. (2025). Analisis praktik public governance development dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2), 319–332. <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Armaida, S. G., & Siregar, E. S. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa (Studi pada Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci). *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 01-20. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.446>
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karta Jaya. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.236>
- Betan, & Nugroho. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58>
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press. <https://drive.google.com/file/d/1pa24WNO1gcr3SL9ufLcm8mki7ecZd-P/view>
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2015). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *JIAKu (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan)*, 3(4), 374–392. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i4.7162>
- Dewi, A. O., Argani, D. A. (2018). Penerapan sistem akuntansi sektor publik di Desa Ngunggahan. *TUNAS MEMBANGUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 33–39.
- Fadhilla, R., Kamilah., Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 38–47. <https://journal.ypp3a.org/index.php/AKUA>
- Harahap, R. (2023). Penerapan sistem akuntansi keuangan desa (siskeudes) dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas). *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 199-207. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.876>
- Isnaeni, D. S. N., & Nugraeni, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 790–796. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3445>
- Jannah, R., & Satria, D. I. (2022). Akuntansi dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang transparan (Studi pada desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(3), 382–397. <https://ojs.unimal.ac.id/jam>
- Kafrini, K., Asrinaldi, A., & Valentina, T. R. (2022). Pengelolaan dana desa dan evaluasi: (Studi kasus terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 391-398. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1901>
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>
- Setyawati, V. D. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 5(2), 122–127.
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan teori sosial dalam paradigma interpretif pada penelitian akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 49-68. <https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972>
- Suciana. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa dombo dengan good governance sebagai variabel intervening. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 997–1008. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.819>

- Suliyatini, M., Satriawan, I., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2025). Transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. *Journal of Applied Accounting (JAA)*, 4(1), 1–6. <http://https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>
- Susanti, M., Afni, N., & Rayyan, Y. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (Studi desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2(1), 120–131. <https://doi.org/10.29103/jam.v>
- Tobler, M. 2015. (2015). Climate geoengineering. *Scientific American*, 312(5), 6. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0515-6>
- Wangdi, I. H. P. (2023). Analisis pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Nogotirto Tahun 2021. *Journal Publicuho*, 5(4), 1224–1233. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.68>